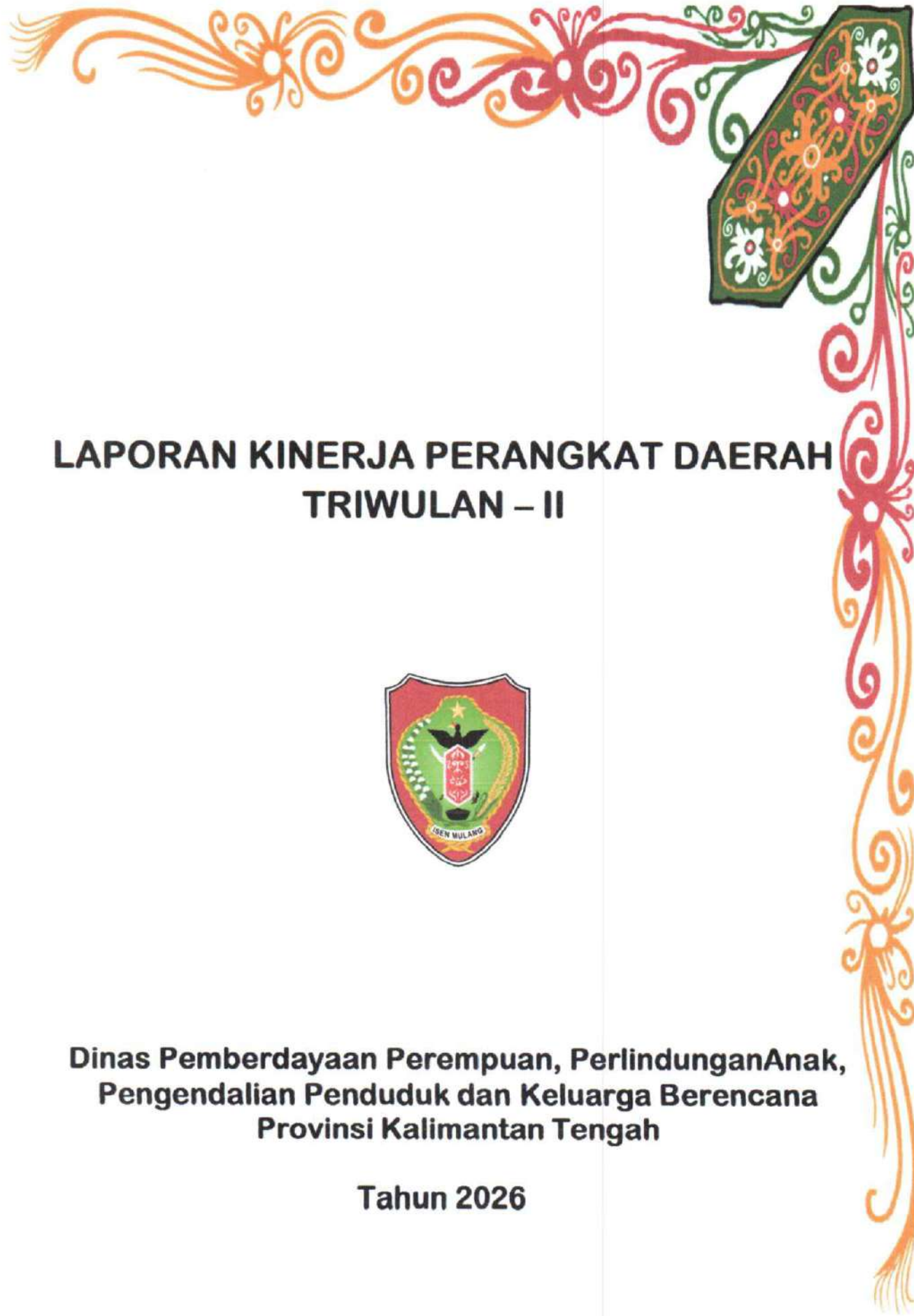




LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN – II



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah**

Tahun 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I KINERJA	1
A. Target indikator Kinerja Utama.....	4
B. Capaian indikator Kinerja.....	6
C. Program dan Kegiatan.....	10
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	51
A. Permasalahan	51
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	53
C. Saran	54
BAB III PENUTUP	55
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2026. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

Hasil capaian kinerja sasaran triwulan merupakan tolak ukur dalam pencapaian kinerja dan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhir kata, kami berharap melalui Laporan Kinerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang. sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 06 Juli 2026



Pid. KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SURYANTO, Aks., M.Si
NIP. 19730108 199403 1 006

BAB I
KINERJA

A. Target Indikator Kinerja Utama

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 Triwulan II serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat Target Tahun 2026 masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Nilai Sakip	Angka	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	4	3,50	3,50	3,50	4
4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
5	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	0	4	8	14
6	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90
10	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48
11	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
12	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
13	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	angka	66,41	66,41	66,41	66,41	66,41
15	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	21	21	21	21	21
16	Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81
17	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
18	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8	8	8	8	8
19	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
20	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	62,64	62,64	62,64	62,64	62,64
21	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,88	86,88	86,88	86,88	86,88
22	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35

B. Capaian Indikator Kinerja

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN II		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Angka	80,35	80,35	81,05	100,871
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,15	89,15	90,04	100,99
		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	4	3,50	1,49	42,57
		Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,4	18,4	2.179 963	188,21
		Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	4	4	100
3	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	78,57	78,57	63,64	80,997

NO	SASARAN • STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN II		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	67,55	100
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,48	3,48	0,377 868	189,14
4	Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	100	111
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	100	111
5	Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,23	2,23	2,22	99,55
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,2	38,2	38,9	98,20

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN II		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,9	57,9	63,6	109,8
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	angka	66,41	66,41	71,0	106,9
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	21	21	20,3	96,99
		Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,8	88,8	90	101,3
		Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,44	8,44	11,0	76,81
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8	8	7,6	95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	CAPAIAN TRIWULAN II		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,7	62,7	67,9	108,2
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks	62,64	62,64	69,9	111,59
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,88	86,88	81,5	94,92
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	26,35	26,35	23,93	90,81
Total skor:					2314,847		
Rata-rata:					105,22 %		

C. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen penjabaran kebijakan dan strategi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk diimplementasikan agar tercapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian program sebagai berikut :

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pengendalian Penduduk (PP)

Program/kegiatan/Sub Kegiatan Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas sub Urusan Pemerintahan yaitu: A. Kualitas Hidup Perempuan; B. Perlindungan Perempuan; C. Kualitas Keluarga; D. Sistem Data Gender dan Anak; E. Pemenuhan Hak Anak; dan F. Perlindungan Khusus Anak.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan			Indeks Ketimpangan Gender	
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
			Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
			Terbentuknya Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah		Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	PROGRAM PENGARUSU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				elaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Pemerintah Kewenangan Provinsi
						Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Kewenangan Provinsi	Perempuan Kewenangan Provinsi	Provinsi
						Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
				Lembaga Masyarakat dalam mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
				Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
				pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
						Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		<i>Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak</i>				Data Provinsi
					Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	
			Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA		Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
						Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
		Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak			Persentase Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	
			Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan		Persentase Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
					Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
			Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
						Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
		Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	
			Menurunkan Angka Kelahiran		Angka kelahiran Total Fertility rate	PROGRAM PENGENDALIAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
					(TFR)	PENDUDUK
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
			Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
						Fasilitasi kerja sama dengan stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program Bangga Kencana
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				KB	Pembinaan Kesertaan Ber-KB	dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
						Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana
			Meningkatkan Keluarga sejahtera		Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Pelaksanaan Pengelolaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan II adalah:

1. Masih kurangnya kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.
2. Keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai 30%, sehingga diperlukan sosialisasi/ pelatihan/ bimtek untuk calon anggota legislatif khusus perempuan.
3. Data yang diminta belum semua terkumpul.
4. Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam pemenuhan hak anak yang dituangkan dalam 5 klaster 1 kelembagaan, yang tertuang dalam 24 indikator kabupaten/kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak anak.
5. Belum semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Pada Tahun 2024 ada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan KLA, 5 (lima) yang mendapatkan predikat Pratama (Palangka Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Sukamara), 2 (dua) yang mendapatkan predikat Madya (Pulang Pisau, dan Kapuas).
6. Masih banyak SDM yang belum memiliki sertifikat Konvensi Hak Anak (KHA).
7. Minimnya fasilitasi atas informasi Layak Anak.
8. Kurangnya sosialisasi terkait Forum Anak Daerah (FAD) sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor).
9. Dukungan anggaran yang kecil dari pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan KLA di Kabupaten/Kota.
10. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Masih ditemukan Perkawinan Anak di beberapa wilayah yang berdampak pada Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Anak.
12. Akses pendidikan yang belum merata, sehingga masih ada anak yang putus sekolah, baik karena faktor ekonomi, lokasi geografis maupun kondisi sosial.

13. Akses Kesehatan dan gizi buruk masih memengaruhi Kualitas Hidup Anak.
14. Masih adanya eksploitasi anak dan bullying.
15. Kurangnya Perlindungan Anak diruang Digital, sehingga Anak menghadapi risiko penipuan daring, paparan konten negatif, pelanggaran privasi dan eksploitasi seksual secara online.
16. Kurangnya kapasitas SDM pada unit layanan di Kabupaten/Kota yang membutuhkan tenaga profesional yang memiliki sertifikat keahlian terutama yang berkaitan dengan hal mediasi dan konseling.
17. Petugas Operator Simfoni PPA Kabupaten/ Kota masih belum sepenuhnya menginput layanan yang diberikan kepada korban ke Simfoni PPA.
18. Kurangnya Anggaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
19. Sinkronisasi data dan implementasi GDPK dan PJPK di kabupaten/kota belum optimal.
20. Belum meratanya akses pelayanan dan promosi penggunaan kontrasepsi modern.
21. Pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi masih belum merata.
22. Program pemberdayaan lansia belum menjangkau seluruh sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian sebagian besar indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun demikian, hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pencapaian sasaran pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek pelaksanaan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat komitmen, koordinasi, sinergi, dan

kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga masyarakat, maupun masyarakat secara luas.

B. Tindaklanjut

Sehubungan dengan masih adanya beberapa kendala dan keterbatasan yang memengaruhi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan berbagai upaya tindak lanjut sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Tindak lanjut tersebut diarahkan untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan efektivitas pencapaian indikator kinerja, serta memperkuat kualitas tata kelola organisasi. Upaya yang dilakukan meliputi :

1. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
2. Koordinasi dan kolaborasi dengan SOPD terkait.
3. Koordinasi dan kolaborasi dengan DP3APPKB kabupaten/kota se Kalimantan Tengah.
4. Koordinasi dengan Tim Gugus Tugas KLA kab/kota yang dilakukan terkait permasalahan dan evaluasi perlindungan dan pemenuhan hak anak.
5. Dilaksanakan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) se Kalimantan Tengah secara Daring.
6. Memperkuat kerjasama antar pemerintah, sekolah, keluarga masyarakat dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
7. Kerjasama dengan instansi terkait klaster 1-5 dan Kelembagaan dalam pengumpulan data untuk penilaian Evaluasi KLA.
8. Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan ke Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Penilaian Evaluasi KLA.
9. Koordinasi penyusunan GDPK dan PJPk advokasi, serta pembinaan pencatatan dan pelaporan dengan instansi terkait.
10. Koordinasi dengan stakeholder dan pelaksanaan advokasi Program Bangga Kencana.

11. Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja serta koordinasi dengan kabupaten/kota.

Berbagai tindak lanjut tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan capaian indikator kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan semakin berkualitas, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

C. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya penyempurnaan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada periode selanjutnya. Rekomendasi yang disusun tidak hanya ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, kualitas tata kelola organisasi, serta pencapaian sasaran dan indikator kinerja secara lebih optimal.

1. Perlunya dukungan dan kerjasama di semua SOPD terkait dalam hal penyediaan data.
2. Perlunya advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi untuk pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
3. Perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah guna Tindaklanjut kasus Perempuan dan Anak, sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
4. Memperkuat peran keluarga tentang pola asuh yang positif, pencegahan kekerasan serta pemenuhan hak-hak anak.
5. Meningkatkan kapasitas SDM melalui Capacity Building tentang pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
6. Perlunya menambah SDM pada layanan UPT yang sesuai standar.
7. Pengajuan usulan bantuan berupa Torlin (Motor Perlindungan Perempuan dan

Anak dan Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Kementerian PPPA RI kepada UPTD PPA di kabupaten wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum memiliki Torlin dan Molin dalam rangka mendukung pelayanan dan penjangkauan korban kekerasan di daerah.

8. Memperluas edukasi Program Bangga Kencana dan penguatan pelayanan KB di daerah dengan TFR tinggi.
9. Meningkatkan kolaborasi dengan sekolah, Forum GenRe, dan lintas sektor untuk pencegahan perkawinan usia anak.
10. Memperkuat komitmen perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi GDPK dan PJPk
11. Meningkatkan pelayanan KB berkualitas dan perluasan kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Mengoptimalkan edukasi pendewasaan usia perkawinan melalui sekolah, desa, dan organisasi masyarakat.
13. Memperluas cakupan pelayanan KB dan berkoordinasi agar Instansi terkait dapat meningkatkan ketersediaan alat kontrasepsi.
14. Memperkuat KIE kesehatan reproduksi bagi remaja dan pasangan usia subur.
15. Mengembangkan program pemberdayaan lansia berbasis keluarga dan masyarakat.
16. Memperkuat pendampingan, monitoring, dan evaluasi Kampung Keluarga Berkualitas secara berkala.

Saran dan rekomendasi berikut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja, sehingga penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappedalitbang dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2029, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata capaian sebesar 100,85% dari seluruh target yang ditetapkan.

Keberhasilan Dinas ini tidak hanya diukur dari pencapaian indikator output triwulan dan tahunan semata, melainkan juga dari dampak jangka panjang yang bersifat strategis. Indikator outcome dan impact yang menjadi tujuan utama Dinas pada hakikatnya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk diukur, serta menjadi tanggung jawab bersama seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Dinas yang menempatkan isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, dan keluarga berencana sebagai bagian integral dari setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan gender serta perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 06 Juli 2026


PIH. KEPALA DINAS P3APKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SURYANTO, Aks., M.Si
NIP. 19730108 199403 1 006

LAMPIRAN

Dokumentasi Rapat



Lampiran : Laporan Triwulan II Tahun 2026
 Nama Perangkat Daerah : Dinas P3appkb Provinsi Kalimantan Tengah
 A. Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Rencana Aksi Proses		Realisasi	Capaian	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
			Target	Realisasi			Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	TW I	80,35	81,05	100,871	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah provinsi			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
				TW I	20%		16,68%	83,40%	TW I	1 Tahun	3 Bulan	25%	TW I	1 Dokumen	1	100%		
			TW II	80,35	81,05	100,871	TW II	50%	36,90%	73,80%	TW II	1 Tahun	6 Bulan	50%	TW II	0 Dokumen	0	0%
			TW III	80,35			TW III	80%			TW III	1 Tahun			TW III	0 Dokumen		
			TW IV	80,35			TW IV	100%			TW IV	1 Tahun			TW IV	0 Dokumen		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			TW I	1 Dokumen	1	100%												
			TW II	0 Dokumen	0	0%												
			TW III	0 Dokumen														
			TW IV	0 Dokumen														
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			TW I	0 Laporan	0	0%												
			TW II	0 Laporan	0	0%												
			TW III	0 Laporan														
			TW IV	1 Laporan														
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			TW I	0 Laporan	0	0%												
			TW II	0 Laporan	0	0%												
			TW III	0 Laporan														
			TW IV	1 Laporan														
			Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
			TW I	1 Tahun	3 Bulan	25%												
			TW II	1 Tahun	6 Bulan	50%												
			TW III	1 Tahun														
			TW IV	1 Tahun														
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			TW I	3 Bulan	3 Bulan	100%												
TW II	6 Bulan	3 Bulan	100%															
TW III	9 Bulan																	
TW IV	12 Bulan																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
TW I	1 Laporan	1	100%															
TW II	0 Laporan	0	0%															
TW III	0 Laporan																	
TW IV	0 Laporan																	

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	TW I	8,45	11	76,81%								Kegiatan Pengembangan Program Desain, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga				Sub Kegiatan Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan			
	TW II	8,45	11	76,81%								TW I	1 Tahun	3 Bulan	0%	TW I	0 Daerah	0	0%
	TW III											TW II	1 Tahun	6 Bulan	0%	TW II	0 Daerah	0	0%
	TW IV											TW III	1 Tahun			TW III	0 Daerah		
8. Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	TW I	8	7,6	95%								Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				Sub Kegiatan Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana			
	TW II	8	7,6	95%								TW I	1 Tahun	3 Bulan	0%	TW I	0 organisasi	0	0%
	TW III											TW II	1 Tahun	6 Bulan	0%	TW II	0 organisasi	0	0%
	TW IV											TW III	1 Tahun			TW III	0 organisasi		
9. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	TW I	62,7	67,9	108,20%								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera				Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan			
	TW II	62,7	67,9	108,20%								TW I	20%	0	0%	TW I	0 Daerah	0	0%
	TW III											TW II	50%	0%	0%	TW II	0 Daerah	0	0%
	TW IV											TW III	80%			TW III	0 Daerah		
10. Indeks Lansia Bercaya	TW I	62,64	69,9	111,59%								TW IV	100%			TW IV	1 Tahun		
	TW II	62,64	69,9	111,59%												Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	TW III															TW I	0 Daerah	0	0%
	TW IV															TW II	0 Daerah	0	0%
11. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	TW I	85,86	81,5	94,92%												Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	TW II	85,86	81,5	94,92%												TW III	0 Daerah		
	TW III															TW IV	1 Daerah		
	TW IV															Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	TW I															Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	TW II															TW I	0 Daerah	0	0%
	TW III															TW II	0 Daerah	0	0%
	TW IV															TW III	0 Daerah		
	TW I															Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	TW II															TW IV	1 Daerah		
	TW III															Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	TW IV															TW I	0 Daerah	0	0%
	TW I															Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	TW II															TW II	0 Daerah	0	0%
	TW III															TW III	0 Daerah		
	TW IV															TW IV	1 Daerah		

12. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas	TW I	26,35	23,93	90,81%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan				Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas			
					TW I	20%	0	0%	TW I	1 Tahun	3 Bulan	0%	TW I	0 Kab/Kota	0	0%
					TW II	50%	0%	0%	TW II	1 Tahun	6 Bulan	0%	TW II	0 Kab/Kota	0	0%
					TW III	80%			TW III	1 Tahun			TW III	0 Kab/Kota		
					TW IV	100%			TW IV	1 Tahun			TW IV	14 Kab/Kota		
													Sub Kegiatan Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota			
													TW I	0 Laporan	0	0%
													TW II	0 Laporan	0	0%
													TW III	0 Laporan		
													TW IV	1 Laporan		
													Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
													TW I	0 Laporan	0	0%
													TW II	0 Laporan	0	0%
													TW III	0 Laporan		
													TW IV	1 Laporan		

B. Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Target Realisasi Penyerapan Anggaran		Realisasi		Capaian		Keterangan
				Pagu Murni							
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			10.288.124.929	TW II	5.144.062.464	TW II	3.791.109.947	TW I	73,70%	Program Pendukung
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			239.922.849	TW II	119.961.425	TW II	0	TW I	0,00%	Program Prioritas
	1)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		21.895.068	TW II	10.947.534	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
		a)	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	4.999.500	TW II	2.499.750	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	4.751.820	TW II	2.375.910	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		c)	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG	5.232.488	TW II	2.616.244	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		d)	Pendampingan Penyelenggaraan PUG	6.911.260	TW II	3.455.630	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	2)	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		213.342.811	TW II	106.671.406	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		a)	Advokasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Hukum dan sosial	6.099.819	TW II	3.049.910	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Hukum dan sosial	203.108.960	TW II	101.554.480	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		c)	Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik Hukum dan sosial	4.134.032	TW II	2.067.016	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas

	3)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	4.684.970	TW II	2.342.485	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	a)	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	4.684.970	TW II	2.342.485	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		303.103.259	TW II	151.551.629	TW II	0	TW I	0,00%	Program Prioritas
	1)	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.451.655	TW II	13.725.828	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
	a)	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	6.551.665	TW II	3.275.833	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	b)	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	4.166.665	TW II	2.083.333	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	c)	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	3.556.665	TW II	1.778.333	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	d)	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	5.993.330	TW II	2.996.665	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	e)	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	7.183.330	TW II	3.591.665	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas

2)	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		171.184.565	TW II	85.592.282	TW II	1.470.880,00	TW I	1,72%	Kegiatan Prioritas
	a)	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	1.950.000	TW II	975.000	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	b)	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	9.000.000	TW II	4.500.000	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	c)	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	39.277.800	TW II	19.638.900	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	d)	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	20.331.690	TW II	10.165.845	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	e)	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	50.625.075	,	25.312.537	TW II	1.470.880,00	TW I	5,81%	Sub Kegiatan Prioritas

	f)	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	50.000.000	TW II	25.000.000	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
3)		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	104.467.039	TW II	52.233.520	TW II	-	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
	a)	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	90.451.579	TW II	45.225.790	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	b)	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	2.716.065	TW II	1.358.033	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	c)	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1.191.665	TW II	595.833	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	d)	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1.691.665	TW II	845.833	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas

		e)	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	8.416.065		4.208.033	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			6.339.480	TW II	3.169.740	TW II	0	TW I	0,00%	Program Prioritas
	1)	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		6.339.480	TW II	3.169.740	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
		a)	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten Kota	2.859.960	TW II	1.429.980	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten Kota	3.479.520	TW II	1.739.760	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			34.664.890	TW II	17.332.445	TW II	0	TW I	0,00%	Program Prioritas
	1)	Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		34.664.890	TW II	17.332.445	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
		a)	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	2.898.160	TW II	1.449.080	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas

		b)	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	31.766.730	TW II	15.883.365	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			74.067.860	TW II	37.033.930	TW II	0	TW I	0,00%	Program Prioritas
	1)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		25.559.920	TW II	12.779.960	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
		a)	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	18.447.360	TW II	9.223.680	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	7.112.560	TW II	3.556.280	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	2)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		48.507.940	TW II	24.253.970	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
		a)	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	48.507.940	TW II	24.253.970	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			390.430.000	TW II	195.215.000	TW II	83.625.000,00	TW I	42,84%	Program Prioritas

1)	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota		107.509.180	TW II	53.754.590	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
	a)	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	103.000.000	TW II	51.500.000	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	b)	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	4.509.180	TW II	2.254.590	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
2)	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		282.920.820	TW II	141.460.410	TW II	83.625.000,00	TW I	59,12%	Kegiatan Prioritas
	a)	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	122.430.820	TW II	61.215.410	TW II	58.290.000,00	TW I	95,22%	Sub Kegiatan Prioritas
	b)	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	80.000.000	TW II	40.000.000	TW II	25.335.000,00	TW I	63,34%	Sub Kegiatan Prioritas
	c)	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	16.200.000	TW II	8.100.000	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas

		d)	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	4.290.000	TW II	2.145.000	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		e)	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	60.000.000	TW II	30.000.000	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
8.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			16.503.913	TW II	8.251.956	TW II	0	TW I	0,00%	Program Prioritas
	1)	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		16.503.913	TW II	8.251.956	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
		a)	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	4.513.578	TW II	2.256.789	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		c)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		d)	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
9.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			201.239.969	TW II	100.619.985	TW II	0	TW I	0,00%	Program Prioritas

1)	Pengembangan Desain Program. Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		43.246.413	TW II	21.623.206	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
	a)	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	13.876.428	TW II	6.938.214	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	b)	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	c)	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	d)	Penggunaan media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.376.428	TW II	10.688.214	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
2)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		157.993.556	TW II	78.996.778	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas

		a)	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	153.996.778	TW II	76.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			27.977.448	TW II	13.988.724	TW II	0	TW I	0,00%	Program Prioritas
	1)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		15.987.113	TW II	7.993.556	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
		a)	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
		c)	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas

	d)	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
2)		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11.990.335	TW II	5.995.167	TW II	0	TW I	0,00%	Kegiatan Prioritas
	a)	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	b)	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten kota	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
	c)	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	3.996.778	TW II	1.998.389	TW II	0	TW I	0,00%	Sub Kegiatan Prioritas
Total			11.582.374.597	TW I	5.791.187.298	TW I	3.874.734.947	TW I	33,45%	



Palangka Raya, 06 Juli 2026
 PIR. KEPALA DINAS P3APPKB
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SURYANTO, Aks., M.Si
 NIP. 19730108 199403 1 006